

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kualitas pelaporan keuangan merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh investor, kreditor, dan regulator karena laporan keuangan mencerminkan kinerja dan posisi finansial perusahaan secara akurat (Larasati & Srimindarti, 2021). Untuk mencapai kualitas tersebut, diperlukan penerapan prinsip akuntansi yang mampu menjaga keandalan dan kehati-hatian dalam penyajian informasi keuangan, salah satunya adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi penting karena membantu mengurangi risiko *earnings management* dan asimetri informasi sehingga laba yang disajikan menjadi lebih realistis dan tidak berlebihan (Rahayu & Emarawati, 2026). Menurut Basu (1997) konservatisme akuntansi merupakan prinsip mendasar yang meningkatkan ketepatan laporan keuangan dengan mengharuskan pengakuan berita buruk (kerugian) lebih cepat dibandingkan berita baik (keuntungan).

Konservatisme akuntansi merupakan pendekatan kehati-hatian dalam pelaporan keuangan yang mana kerugian dan beban diakui lebih cepat daripada pendapatan dan keuntungan untuk mencerminkan posisi ekonomi perusahaan secara hati-hati (Ibrahimi & Suryaputri, 2022). Prinsip ini membantu mengurangi potensi kesalahan pelaporan yang dapat merugikan pemegang saham (Sari & Srimindarti, 2022). Transparansi konservatif membuka peluang bagi pengawasan eksternal yang lebih efektif oleh pihak luar seperti kreditor dan investor yang cenderung lebih berhati-hati dalam menilai risiko keuangan perusahaan (Putri & Karmudiandri, 2024). Dengan demikian konservatisme akuntansi tidak hanya

bersifat konservatisme akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap integritas pelaporan keuangan perusahaan publik di Indonesia (Bukit *et al.*, 2025). Namun, minimnya penerapan prinsip kehati-hatian ini dalam praktik justru tercermin dari berbagai kasus kecurangan pelaporan keuangan yang masih terjadi di Indonesia.

Halim & Salim (2023) menyatakan bahwa masih rendahnya penerapan prinsip kehati-hatian di Indonesia tercermin dari berbagai kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu kasus yang paling menonjol dan sering dijadikan rujukan dalam konteks ini adalah kasus manipulasi laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk pada tahun 2018. Perusahaan terbukti mengakui pendapatan secara prematur dari PT Mahata Aero Teknologi sebesar US\$ 239,94 juta yang masih berstatus piutang. Akibatnya, laporan keuangan yang seharusnya merugi justru mencatat laba bersih sebesar US\$ 809,85 ribu (setara Rp 11,33 miliar) (CNN Indonesia, 2019). Hal ini membuktikan pengabaian prinsip kehati-hatian, di mana perusahaan mencatat laba jauh lebih tinggi dari kondisi yang sebenarnya.

Fenomena serupa terjadi pada PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA), di mana investigasi KAP EY pada Maret 2019 menemukan adanya praktik akuntansi yang menyesatkan dalam laporan keuangan tahun 2017. Manajemen baru mengungkapkan bahwa pengabaian terhadap prinsip konservatisme akuntansi berupa penggelembungan nilai aset (*overstatement*) hingga Rp 4 triliun, yang tersebar pada pos persediaan, piutang, dan aset tetap. Selain manipulasi pada angka EBITDA, ditemukan pula aliran dana sebesar Rp 1,78 triliun yang dialihkan secara tidak sah ke pihak afiliasi melalui skema pinjaman dan deposito yang bertentangan dengan prinsip pengakuan pendapatan secara konservatif.

Tidak hanya itu, perbedaan antara data internal perusahaan dengan dokumen audit, menunjukkan kegagalan penerapan konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan (Wareza, 2019).

Fenomena konservatisme ini kembali terulang pada kasus PT Indofarma Tbk, di mana manajemen perusahaan secara sengaja menunda pencadangan piutang macet senilai Rp 122,93 miliar demi menyembunyikan kerugian riil perusahaan. Penundaan pencadangan tersebut menyebabkan laporan keuangan perusahaan tidak mencerminkan risiko kerugian yang sesungguhnya sudah terjadi, sehingga kinerja keuangan yang disajikan menjadi lebih baik dari kondisi riil. Padahal, prinsip konservatisme akuntansi menekankan bahwa setiap potensi kerugian, termasuk piutang yang berisiko tidak tertagih, seharusnya segera diakui dan dicadangkan begitu terdapat indikasi ketidakpastian, bukan ditunda hingga menimbulkan akumulasi risiko yang lebih besar. Akibat dari praktik tersebut, ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 371,83 miliar (BPK RI, 2024).

Ketiga kasus tersebut menunjukkan pola yang konsisten, yaitu kecenderungan manajemen mengabaikan prinsip kehati-hatian, baik melalui pengakuan pendapatan secara prematur, penggelembungan nilai aset, maupun penundaan pengakuan kerugian, demi menampilkan kinerja keuangan yang lebih baik dari kondisi sebenarnya. Dampak dari praktik tersebut tidak hanya merugikan pemegang saham dan investor, tetapi dalam kasus Indofarma turut merugikan keuangan negara, sehingga menunjukkan bahwa lemahnya penerapan konservatisme dapat berdampak luas. Fenomena-fenomena ini menegaskan pentingnya konservatisme akuntansi sebagai mekanisme pencegahan kecurangan pelaporan keuangan, sekaligus menjadi dasar urgensi penelitian ini untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhinya.

Beberapa penelitian terdahulu telah menginvestigasi faktor apa saja yang menjadi pemicu perusahaan untuk menerapkan prinsip konservatisme akuntansi. faktor pertama yakni *capital intensity* atau intensitas modal, yang menggambarkan seberapa besar porsi investasi perusahaan yang tertanam pada aset tetap untuk menjalankan operasionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh (Achyani *et al.*, 2021; Edgina, 2023; Safira *et al.*, 2024) yang menemukan bahwa *capital intensity* memberi pengaruh bagi konservatisme akuntansi. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Kurniawan *et al.*, 2022; Stiawan *et al.*, 2022; Phuong Hong & Tra My, 2024; Prayoga *et al.*, 2025) yang tidak menemukan bukti adanya pengaruh dari *capital intensity* pada penerapan konservatisme akuntansi.

Faktor kedua yakni, *leverage* atau struktur utang merupakan variabel penting karena tingkat utang tinggi meningkatkan risiko kegagalan memenuhi kewajiban finansial dan tekanan dari kreditor terhadap pelaporan keuangan yang lebih hati-hati (Putri & Karmudiandri, 2024). Beberapa penelitian menemukan bahwa *leverage* yang tinggi mendorong penerapan konservatisme akuntansi karena perusahaan berupaya menjaga reputasi di mata kreditor dan menghindari pelanggaran *debt covenant* (Bukit *et al.*, 2025). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian (Dewi & Heliawan, 2021; Hosianna & Lestari, 2024; Rahayu & Emarawati, 2026; Sari & Srimindarti, 2022; Rismawati & Nurhayati, 2023; Ibrahimy & Suryaputri, 2022; Utami & Isnawati, 2023; Phuong Hong & Tra My, 2024) yang membuktikan *leverage* memberi pengaruh pada konservatisme akuntansi. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Edgina, 2023; Priyono & Suhartini, 2022; Hardiyanti *et al.*, 2022; Kurniawan *et al.*, 2022) yang tidak menemukan bukti adanya pengaruh dari *leverage* pada praktik konservatisme akuntansi.

Faktor terakhir yakni *firm size* atau ukuran perusahaan juga memengaruhi konservatisme akuntansi karena perusahaan besar lebih tertekan oleh publik dan aturan ketat, sehingga cenderung melaporkan keuangan secara hati-hati untuk menjaga reputasi dan kepercayaan investor (Tazkiya & Sulastiningsih, 2020). Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji pengaruh dari *firm size* terhadap konservatisme akuntansi, termasuk penelitian (Dewi & Heliawan, 2021; Ibrahimy & Suryaputri, 2022; Hosianna & Lestari, 2024; Kurniawan *et al.*, 2022 Sari & Srimindarti, 2022) yang membuktikan *firm size* memberi pengaruh pada konservatisme akuntansi. Temuan ini bertentangan dengan penelitian (Dwi & Wirawan, 2024; Utami & Isnawati, 2023; Priyono & Suhartini, 2022), yang tidak menemukan bukti adanya pengaruh dari *firm size* pada praktik konservatisme akuntansi.

Ketidakkonsistenan temuan empiris mengenai pengaruh *Capital Intensity*, *leverage*, dan *firm size* terhadap konservatisme akuntansi menunjukkan bahwa masih terdapat *gap* penelitian. Penelitian ini merupakan replikasi atas penelitian Ibrahimy & Suryaputri (2022) dengan menggunakan variabel *leverage* dan *firm size*. Penelitian ini berbeda sebab mengambil periode pengamatan dari 2020 hingga 2024, yang mencerminkan kondisi terbaru dalam praktik pelaporan keuangan perusahaan serta dinamika penerapan prinsip konservatisme dalam laporan keuangan perusahaan publik. Selain itu, penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor makanan dan minuman sebagai objek penelitian, sedangkan penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Perusahaan nonkeuangan dipilih karena sektor ini memiliki cakupan industri yang lebih luas serta karakteristik operasional dan struktur aset yang lebih

beragam, selain itu sektor ini dipilih karena umumnya memiliki proporsi aset tetap yang sangat besar (*high capital intensity*) dan sangat bergantung pada pendanaan eksternal atau kredit bank (*leverage*) jika dibandingkan dengan sektor keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai konservatisme akuntansi pada umumnya masih terfokus pada sektor-sektor tertentu secara terpisah, seperti sektor makanan dan minuman, manufaktur, transportasi, serta properti dan real estate, sehingga cakupannya masih terbatas dan belum mencerminkan keragaman karakteristik industri nonkeuangan secara menyeluruh. Karakteristik operasional dan struktur aset yang beragam ini menjadikan sektor nonkeuangan sebagai objek yang paling ideal dan relevan untuk menguji pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan *firm size* terhadap konservatisme akuntansi, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik penerapan konservatisme akuntansi pada perusahaan publik.

Penelitian ini menggabungkan tiga variabel fundamental internal yakni *capital intensity*, *leverage*, dan *firm size* dalam satu kerangka *Positive Accounting Theory*. Menurut Watts & Zimmerman (1990) pemilihan kebijakan akuntansi oleh manajemen, termasuk penerapan konservatisme akuntansi, dipengaruhi oleh berbagai kondisi internal perusahaan sebagai upaya meminimalkan biaya yang timbul akibat hubungan kontraktual maupun tekanan dari pihak eksternal. Dalam penelitian ini, *firm size* dan *capital intensity* dijelaskan melalui *Political Cost Hypothesis*. Perusahaan dengan ukuran yang besar maupun proporsi aset tetap yang tinggi cenderung menghadapi biaya politik yang lebih besar, seperti pengawasan pemerintah, beban perpajakan, serta tuntutan dari regulator dan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong manajemen untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih konservatif guna mengurangi tekanan politik yang

dihadapi. Sementara itu, *leverage* dijelaskan melalui *Debt Covenant Hypothesis*, yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung menerapkan pelaporan keuangan yang lebih hati-hati untuk meminimalkan risiko pelanggaran perjanjian utang serta menjaga kepercayaan kreditor.

Dengan demikian, penelitian ini menguji dua dari tiga hipotesis utama dalam *Positive Accounting Theory*, yaitu *Political Cost Hypothesis* yang diproksikan melalui *firm size* dan *capital intensity*, serta *Debt Covenant Hypothesis* yang diproksikan melalui *leverage*, dalam satu model penelitian. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor internal perusahaan yang memengaruhi penerapan konservatisme akuntansi. Penelitian ini berbeda dengan Ibrahimy & Suryaputri (2022) yang hanya meneliti pengaruh *firm size* dan *leverage* terhadap konservatisme akuntansi pada sektor makanan dan minuman periode 2019-2021.

Penelitian ini menambahkan variabel *capital intensity* untuk diteliti pengaruhnya terhadap konservatisme akuntansi, sekaligus memperluas objek penelitian ke seluruh sektor nonkeuangan dengan periode yang berbeda. *Capital intensity* mencerminkan seberapa besar porsi investasi yang dialokasikan perusahaan pada aset tetap dari keseluruhan total asetnya, sehingga dapat menunjukkan seberapa besar perusahaan mengandalkan aset berwujud dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan demikian, kombinasi variabel *capital intensity*, *leverage*, dan *firm size*, yang diuji secara bersamaan pada cakupan sektor nonkeuangan yang lebih luas, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh kondisi keuangan internal terhadap penerapan konservatisme akuntansi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?
3. Apakah *firm size* berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini :

1. Untuk menguji pengaruh *capital intensity* terhadap konservatisme akuntansi.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap konservatisme akuntansi.
3. Untuk menguji pengaruh *firm size* terhadap konservatisme akuntansi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu secara teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian di bidang akuntansi keuangan, khususnya mengenai penerapan konservatisme akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan Teori Akuntansi Positif (*Positive Accounting Theory*) yang dikemukakan oleh Watts & Zimmerman (1990), khususnya *political cost hypothesis* dan *debt covenant hypothesis*, sebagai dasar untuk menjelaskan pengaruh *capital intensity*, *leverage*, dan *firm size* terhadap konservatisme akuntansi. Secara spesifik, penelitian ini diharapkan dapat menambah bukti empiris mengenai hubungan antara ketiga variabel tersebut

dengan tingkat konservatisme akuntansi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sekaligus memperkuat maupun memperkaya pengujian atas kedua hipotesis dalam Teori Akuntansi Positif tersebut. Dengan menambahkan variabel *capital intensity* sebagai bentuk pengembangan dari penelitian terdahulu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik konservatisme akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Regulator dan Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi empiris bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI), bahwa intensitas modal (*capital intensity*) dan ukuran perusahaan (*firm size*) terbukti memengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Temuan ini dapat menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengawasan pelaporan keuangan yang lebih memperhatikan karakteristik perusahaan dengan aset besar dan skala usaha yang besar, guna mendukung peningkatan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan di Indonesia.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen dalam menetapkan kebijakan akuntansi, khususnya karena hasil penelitian menunjukkan bahwa *capital intensity* dan *firm size* berpengaruh positif terhadap penerapan konservatisme akuntansi, sedangkan *leverage* tidak terbukti berpengaruh. Temuan ini dapat membantu manajemen memahami bahwa kebijakan konservatisme lebih relevan dikaitkan dengan besarnya investasi pada aset tetap dan skala perusahaan, dibandingkan dengan tingkat utang yang dimiliki,

sehingga manajemen dapat menyusun laporan keuangan yang lebih andal, transparan, dan sesuai dengan karakteristik perusahaan.

c. Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi investor dan kreditor bahwa tingkat kehati-hatian (konservatisme) perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan lebih dipengaruhi oleh besarnya *capital intensity* dan *firm size*, bukan oleh tingkat *leverage* perusahaan. Dengan memahami hal ini, investor dan kreditor diharapkan dapat lebih cermat dalam menilai laporan keuangan perusahaan dengan proporsi aset tetap dan skala usaha yang besar, karena laporan keuangan tersebut cenderung disajikan secara lebih konservatif dan mencerminkan kondisi keuangan yang lebih realistis.